

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan periode yang penuh dinamika dan perubahan. Beragam aktivitas menjadi bagian dari perjalanan hidup remaja seiring bertambahnya usia. Pada masa pubertas, remaja memiliki dorongan dan keinginan kuat terkait berbagai perubahan yang mereka alami, serta cenderung mulai tertarik melakukan tindakan yang dapat menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Mereka berusaha mencari informasi mengenai hal-hal tersebut, bahkan jika harus melanggar aturan. Seringkali, mereka merasa bingung mengenai kepada siapa harus bertanya. Sementara itu, arus informasi yang tersedia kerap menawarkan pilihan yang dapat mendorong perilaku negatif.

Peran pendidikan sangat penting untuk menjembatani rasa ingin tahu remaja dengan berbagai informasi yang berpotensi merusak, melalui penyampaian informasi yang lengkap, benar, jujur, dan sesuai dengan tingkat kematangan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling (BK). Dengan kemampuan manajerial yang baik, kepala sekolah dapat merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru BK. Sebaliknya, jika kemampuan manajerial kepala sekolah rendah, hal itu akan berdampak pada efektivitas pengelolaan sekolah, terutama dalam mengelola guru.

Sebagai administrator pendidikan, kepala sekolah perlu memperkaya wawasan kepemimpinannya dengan pengetahuan serta sikap yang proaktif dalam menghadapi perubahan di masyarakat, termasuk perkembangan kebijakan pendidikan makro. Salah satu perubahan paling menonjol saat ini adalah meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, serta tuntutan

terhadap kebijakan pendidikan yang mencakup peningkatan pemerataan kesempatan, kualitas, efisiensi, dan relevansi.

Susanto (2008:86) menguraikan ciri-ciri manajemen yang sukses, yaitu: (1) kemampuan manajemen untuk mengkritisi diri sendiri, mengakui, menerima, dan belajar dari kesalahan masa lalu, (2) mendorong konfrontasi yang terbuka dan konstruktif sebagai metode pemecahan masalah, (3) keputusan yang diambil secara konsensus harus mendapat dukungan penuh, dan posisi dalam organisasi tidak menjamin kualitas ide, (4) manajemen yang transparan, bertindak sesuai etika, berkata jujur, dan memberikan perlakuan setara bagi semua karyawan, serta (5) keyakinan pada prinsip kerja keras di mana produktivitas tinggi dihargai, adanya komitmen jangka panjang, dan jika terjadi masalah karir, pengunduran diri lebih disukai daripada pemecatan. Kemampuan manajerial kepala sekolah mencakup keterampilan mengatur dan mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien demi meningkatkan kompetensi guru.

Guru bertindak sebagai pengajar, pendidik, pelatih, dan pembimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Jika seorang guru mampu menjalankan proses pembelajaran dengan baik, hal ini akan berdampak positif pada keberhasilan belajar siswa (Sardiman AM, 2001: 70). Selain itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar oleh guru profesional memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, di mana kompetensi yang dimiliki diterapkan secara optimal. Tanpa persiapan dan perencanaan yang memadai, kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan efektif. Persiapan yang matang memungkinkan tercapainya keberhasilan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Guru adalah elemen kunci dalam keseluruhan sistem pendidikan dan harus menjadi prioritas utama perhatian. Peran guru selalu menjadi fokus strategis dalam diskusi pendidikan karena keterkaitannya dengan berbagai komponen dalam sistem pendidikan. Guru memiliki peran sentral dalam membangun pendidikan, terutama di institusi formal seperti sekolah, serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan peserta didik, khususnya dalam

proses belajar-mengajar. Proses ini adalah komponen paling penting dalam menciptakan kualitas proses dan hasil pendidikan yang baik, dan guru memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan, termasuk di tingkat pendidikan dasar dan Sekolah Menengah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 8 ayat (1) tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi."

Pelaksanaan layanan BK pola 17 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 025/0/1995 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Tugas utama guru pembimbing sesuai standar kinerja, seperti yang disebutkan oleh Depdikbud (1997: 84), mencakup: (1) penyusunan program, (2) pelaksanaan program, (3) pelaksanaan evaluasi program, (4) analisis hasil evaluasi program, dan (5) tindak lanjut hasil analisis. Dengan adanya kepmendikbud tersebut, diharapkan guru pembimbing dapat menjalankan tugas layanan bimbingan dan konseling dengan baik, sehingga pelaksanaan layanan ini di sekolah dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pelayanan dasar merupakan proses bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang sistematis, Ini dilakukan secara klasik atau kelompok dan bertujuan untuk meningkatkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap perkembangan dan tugas-tugas kompetensi kemandirian yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Sehingga sangat penting bagi guru Bimbingan konseling untuk melakukan evaluasi program bimbingan konseling, yang merupakan bagian penting dari pekerjaannya di sekolah atau di lembaga pendidikan tertentu (Suseno, 2021). Hal ini karena hasil evaluasi dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk menentukan seberapa efektif layanan program bimbingan konseling yang mereka rancang dan

laksanakan di tempat kerja mereka. Dari penjelasan yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan khusus untuk mencapai keberhasilan, khususnya dalam hal menawarkan nasehat dan bimbingan. Dengan adanya bimbingan konseling maka seorang guru dan pendidik harus memiliki kualitas tinggi, sebab merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan kualitas pendidikan.

Sebagai pelaksana guru bimbingan dan konseling (BK) yang merupakan bagian penting dari pendidikan karena mereka akan membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Untuk menjadi seorang guru BK yang profesional, setidaknya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Jika tidak, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik (Baeti, 2021). Sejalan dengan pendapat sebelumnya menurut (Yanti, 2022) tugas guru bimbingan dan konseling (BK) sangat penting karena membantu proses belajar dan menyesuaikan diri siswa. Karena tugas berat ini, guru BK harus memiliki sikap profesional untuk melakukannya. Guru BK terkait dengan pengembangan diri siswa sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kepribadian siswa di sekolah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 menyebutkan secara rinci tentang profesi pendidik. Beberapa diantaranya adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Disebutkan pula bahwa tutor, instruktur, ataupun fasilitator juga merupakan seorang pendidik. Sebagai pelaksana pendidikan maka seorang guru diwajibkan untuk bertindak dan bersikap profesional, Oleh karena itu Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 berlaku. Standar undang-undang harus dipenuhi, Kualitas dan kemampuan seorang guru sangat bergantung, karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan (Abdoel Muis, 2020). Adapun wujud nyata guru BK profesional adalah kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah, sebagaimana tertuang

dalam Permendiknas RI Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menetapkan bahwa guru bimbingan dan konselor dan konselor harus memiliki empat (empat) bidang kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Keempat rumusan kompetensi ini berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja guru bimbingan dan konselor. Menurut (Abdoel Muis, 2020) Secara khusus, empat kemampuan utama diatas dibagi menjadi beberapa bagian lagi. *Kompetensi Pedagogik* terbagi menjadi tiga bagian: Penguasaan teori dan praktik pendidikan, kemampuan untuk menerapkan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku siswa, dan penguasaan pentingnya pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. *Kompetensi Kepribadian* termasuk iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan kemampuan untuk berkinerja dengan baik. Kemampuan ketiga, *Kompetensi Sosial*, ditunjukkan dengan kemampuan untuk melakukan kolaborasi intern di tempat kerja, berpartisipasi aktif dalam organisasi dan kegiatan BK, dan mampu melakukan kolaborasi antar profesi. Kompetensi terakhir, *Kompetensi Profesional*, ditunjukkan dengan penguasaan konsep dan praktik asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, dan memahami kerangka teoretik dan praktik bimbingan konseling.

Mengingat bahwa layanan bimbingan konseling merupakan layanan profesional, mereka harus diberikan secara profesional oleh individu yang memiliki kewenangan dan kemampuan profesional. Oleh karena itu, layanan BK profesional harus diberikan oleh guru bimbingan konseling profesional juga untuk berhasil. Dengan demikian, guru harus mempersiapkan ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling (Yanti, 2022).

Secara normatif, kondisi guru BK dan pentingnya kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK diatur oleh berbagai regulasi pendidikan di Indonesia. Guru BK wajib memiliki kompetensi profesional sesuai dengan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Mereka harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, yakni minimal sarjana (S1) atau yang setara di bidang Bimbingan dan Konseling, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru, guru BK wajib memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan dasar bimbingan secara sistematis. Evaluasi layanan dasar diperlukan untuk memastikan efektivitas program BK dalam mendukung perkembangan akademik, personal, dan sosial siswa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru BK dalam evaluasi layanan dasar bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga kewajiban hukum untuk menjamin mutu pendidikan dan pembimbingan siswa di sekolah. Dengan landasan ini, kondisi guru BK idealnya mencakup kemampuan yang memadai dalam melaksanakan evaluasi layanan dasar guna menjamin kualitas bimbingan kepada siswa. Evaluasi ini penting sebagai alat untuk menilai efektivitas layanan, mendukung keberhasilan peserta didik, dan memenuhi standar mutu pendidikan nasional.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa kenyataan di lapangan setelah penulis melakukan studi pendahuluan pada beberapa sekolah yang menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi evaluasi layanan dasar oleh guru BK, antara lain banyak guru BK menghadapi keterbatasan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan dasar secara efektif, terutama karena kurangnya pelatihan atau pembinaan yang berkelanjutan. Pada beberapa sekolah, instrumen evaluasi yang digunakan oleh guru BK belum terstandar, sehingga hasil evaluasi sering kali kurang valid atau relevan dengan kebutuhan siswa. Beberapa kepala sekolah belum sepenuhnya mendukung program pengembangan kompetensi guru BK, baik dalam bentuk alokasi

sumber daya, waktu, maupun pelatihan khusus. Dalam era pendidikan abad ke-21, layanan BK diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai pendukung pengembangan potensi siswa. Untuk itu, evaluasi layanan menjadi kunci dalam memastikan layanan yang diberikan relevan dan berkualitas. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa penelitian tentang manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi guru BK sangat penting untuk menjawab tantangan yang ada dan menciptakan layanan BK yang lebih efektif dan bermutu tinggi.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa guru belum menguasai kompetensi yang harus dimiliki ketika melakukan layanan bimbingan konseling. Hal ini dibuktikan masih banyak kendala terkait program layanan bimbingan konseling (BK) di lapangan, diantaranya sebagian besar guru BK di lapangan masih belum melakukan evaluasi program layanan BK di tempat mereka bekerja (Asni & Fauzi Nur Ilahi, 2022). Guru BK telah memberikan layanan dasar dengan baik (kategori tinggi), tetapi beberapa layanan masih belum memenuhi standar yang diharapkan sesuai dengan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (Kurnianto, 2018). Kemudian Termasuk (1) kompetensi guru bimbingan dan konseling yang tidak memenuhi standar, siswa yang tertutup, masalah program bimbingan dan konseling, dan prasarana bimbingan dan konseling; (2) penyebab masalah adalah faktor internal, yang mencakup masalah guru bimbingan konseling dan siswa (klien), dan faktor eksternal, yang mencakup masalah bimbingan konseling dan siswa (klien) (Nuroniya, 2023).

Sejalan dengan kasus di atas menunjukkan bahwa ada beberapa elemen masalah terkait layanan Bimbingan Konseling, Diduga hal ini disebabkan oleh manajemen kepala sekolah yang buruk atau tidak optimal. Manajemen kepala sekolah harus terarah dan sistematis, hal tersebut karena merupakan manifestasi dan akumulasi terhadap guru layanan bimbingan dan konseling.

Manajemen kepala sekolah belum sesuai dengan sebagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dicarikan solusinya, Dengan adanya evaluasi proses, kepala

sekolah mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu program layanan bimbingan dan konseling agar dapat segera diperbaiki dan dikembangkan. Masalah tersebut jelas sangat mempengaruhi efektifitas dan efesiensi layanan bimbingan konseling, hal ini menjadi tugas berat dan tanggung jawab bagi pemangku kebijakan ataupun kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Para praktisi pendidikan, konselor, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan berbenah diri untuk memfokuskan kepada layanan bimbingan konseling. Agar disadari bahwa masalah layanan bimbingan konseling di atas itu sangatlah perlu untuk dicari solusinya. Dalam menyikapi hal tersebut peneliti melakukan studi pendahuluan di di SMPN 182 dan SMPIT Arrahman Jakarta Selatan, terdapat masalah yaitu rendahnya kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di sekolah, ini dibuktikan dengan beberapa fenomena yang terjadi.

Pada umumnya guru bimbingan dan konseling (BK) sering melakukan kesalahan atau tidak memiliki kopetensi terhadap penguasaan pelayanan (BK) di sekolah, di antaranya guru pada SMPN 182 dan SMPIT Arrahman dalam membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) tidak mampu membuat tujuan sesuai topik, tidak mampu memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan, serta tidak membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai metode. Di samping itu juga program BK belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan belum terlaksananya kegiatan evaluasi proses layanan dasar, kompetensi guru BK yang kurang, manajemen BK belum terlaksana dengan baik, guru BK belum memadai, guru BK bukan dari spesifikasi jurusan BK sementara evaluasi proses layanan dasar BK belum terlaksana.

Masalah ini perlu diteliti karena beberapa alasan utama yang mendasarinya, diantaranya: 1) Kompetensi guru BK dalam evaluasi layanan dasar sangat penting untuk memastikan layanan bimbingan yang efektif, yang berdampak langsung pada perkembangan siswa secara akademik, sosial, dan emosional; 2) Banyak guru BK belum memiliki kemampuan optimal dalam melaksanakan evaluasi layanan dasar sesuai standar yang diharapkan, sehingga

hasil layanan kurang memadai; 3) Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi guru BK, namun manajemen yang belum optimal sering menjadi kendala; dan 4) Penelitian ini dapat memberikan data empiris untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pengembangan profesional guru BK. Melalui penelitian ini, diharapkan solusi konkret dapat ditemukan untuk meningkatkan mutu layanan BK melalui penguatan manajemen dan kompetensi evaluasi.

Manajemen kepala sekolah di SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan mulai dari proses *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) yang merupakan fungsi manajemen bimbingan konseling dalam proses yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Landasan teori manajemen menurut G.R. Terry (2012: 4) bahwa, “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber lain.” Dalam peran manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK. Menurut G.R. Terry, manajemen didefinisikan sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Komponen-komponen ini relevan dengan tugas kepala sekolah dalam mengelola dan meningkatkan kompetensi guru BK.

Teori manajemen G.R. Terry mendasari pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah memiliki peran kunci dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen ini, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional guru BK, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif kepada siswa.

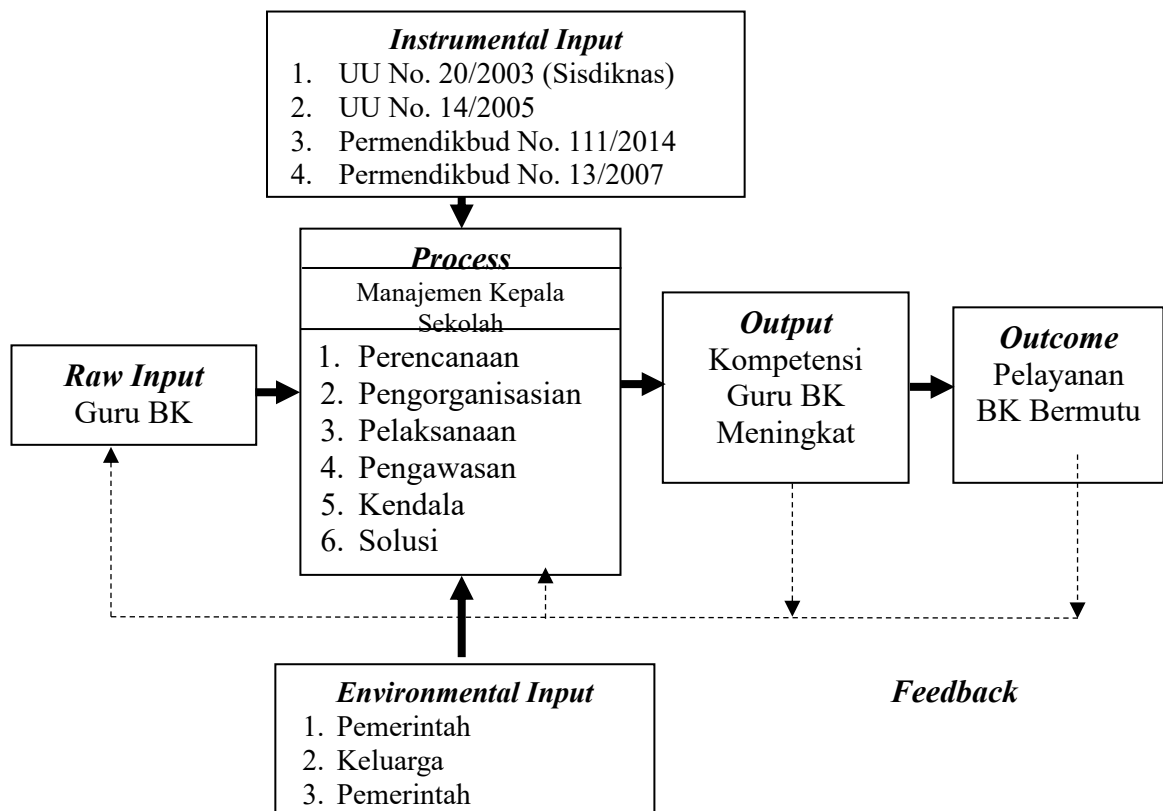
Berdasarkan kondisi dan masalah di atas, penulis menemukan 2 (dua) sekolah yang akan dijadikan objek penelitian terkait manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK. karena sekolah tersebut terdapat permasalahan mengenai rendahnya kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK, maka hal tersebut penting untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK dengan memfokuskan pada 2 lokasi sekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi penguatan layanan dasar bimbingan konseling di sekolah, maka untuk memperoleh jawaban yang komprehensif mengenai pengelolaan peningkatan kompetensi guru BK dalam aspek evaluasi layanan, penulis melakukan penelitian disertasi dengan judul: **“Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Evaluasi Layanan Dasar Guru Bimbingan Konseling (Studi Deskriptif di SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan).”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi kajian utama dilaksanakannya penelitian ini disajikan melalui bagan berikut:



Gambar 1.1 Perumusan Masalah

- a. *Raw input* : Guru BK merupakan seorang pendidik yang memiliki peran utama dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah. Fungsi utama Guru BK adalah membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karier, serta mendukung perkembangan emosional dan psikologis mereka. Guru BK berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesejahteraan mental dan sosial siswa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan akademik mereka.
- b. *Process* : Manajemen Kepala Sekolah merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola dan memimpin kegiatan di sekolah, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, manajemen kepala sekolah dapat diuraikan dalam beberapa tahapan berikut: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta kendala yang mungkin dihadapi beserta solusinya sehingga diperoleh hasil yang diharapkan.

- c. *Output* : Kompetensi Guru BK merupakan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Guru BK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kompetensi ini meliputi berbagai aspek yang diperlukan untuk mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier siswa.
- d. *Outcome* : Pelayanan BK Bermutu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa dengan standar kualitas yang tinggi, efektif, dan relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa. Layanan BK bermutu memiliki beberapa ciri dan karakteristik yang membuatnya mampu memberikan dampak positif dalam perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier siswa
- e. *Instrumental input* : Kebijakan-kebijakan sektor pendidikan meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan menengah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur tentang kewajiban guru untuk meningkatkan kompetensinya, yang juga mencakup guru BK.
- f. *Environmental input* :
 - 1) Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, pengawas, dan pengatur dalam sistem pendidikan, serta penyedia sumber daya untuk mendukung kualitas pendidikan nasional. Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan standar pendidikan, menyediakan kurikulum, memastikan ketersediaan tenaga

pendidik yang kompeten, dan mendukung lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas

- 2) Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak, yang berperan sebagai pemberi dasar pendidikan karakter, nilai, dan moral. Keluarga mendukung pendidikan formal di sekolah dengan memberikan motivasi, perhatian, dan pendampingan belajar bagi anak, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik, sosial, dan emosional.
- 3) Pengguna lulusan merupakan pihak atau institusi yang memanfaatkan tenaga kerja dari lulusan lembaga pendidikan, termasuk sektor industri, dunia usaha, lembaga pemerintah, serta masyarakat secara luas. Mereka berperan dalam memberikan masukan terhadap kurikulum, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan agar lulusan sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan dapat berkontribusi efektif dalam bidang profesionalnya.

g. Feedback (Umpan Balik)

Umpan balik berperan penting sebagai mekanisme kontrol dalam manajemen kepala sekolah, agar seluruh aktivitas peningkatan kompetensi evaluasi layanan dasar guru Bimbingan Konseling dapat terkoordinasi dengan baik, saling mendukung, dan membentuk sistem kerja yang terintegrasi secara menyeluruh.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luarnya permasalahan maka penelitian diartasi ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan:
 - 1) Identifikasi kebutuhan bagi guru BK
 - 2) Tujuan dan sasaran
 - 3) Rencana program;
 - 4) Pengalokasian sumber daya;

- 5) Pengembangan instrumen evaluasi.
- b. Pengorganisasian kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan:
 - 1) Penentuan tim evaluasi
 - 2) Penjadwalan evaluasi
 - 3) Penentuan indikator evaluasi;
- c. Pelaksanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan:
 - 1) Pelatihan dan pengembangan;
 - 2) Pemberian panduan dan sumber daya;
 - 3) Kolaborasi dan pertukaran pengalaman;
 - 4) Monitoring dan umpan balik;
 - 5) Pemberian dukungan dan bimbingan.
- d. Pengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan:
 - 1) Observasi kelas;
 - 2) Review dokumen evaluasi;
 - 3) Analisis data evaluasi;
- e. Kendala Manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan
 - 1) Anggaran;
 - 2) Waktu;
 - 3) Dukungan sumber daya manusia;
 - 4) Minat atau motivasi Guru BK.
- f. Solusi Menghadapi Kendala Manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan:

- 1) Anggaran
- 2) Waktu
- 3) Dukungan Sumber Daya
- 4) Minat atau Motivasi Guru BK

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan informasi/gambaran dan menganalisis tentang manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan

b. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan informasi/gambaran dan menganalisa tentang:

- 1) Perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.
- 2) Pengorganisasian kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.
- 3) Pelaksanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.
- 4) Pengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.
- 5) Kendala kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.

- 6) Solusi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan..

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasanah keilmuan serta mampu memberikan sumbangsih berkaitan dengan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini dapat membantu kepala sekolah dalam memahami dan menerapkan strategi manajemen yang efektif untuk meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK. Ini juga dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memahami bagaimana cara mendukung pengembangan profesional guru BK.

2) Bagi Guru BK

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk memahami lebih baik tentang evaluasi layanan dasar dan bagaimana meningkatkan kompetensi guru BK. mereka juga dapat memahami bagaimana kepala sekolah dapat mendukung guru BK dalam proses ini.

3) Bagi Komite Sekolah

Dapat membantu komite sekolah dalam membangun kerjasama yang lebih baik dengan kepala sekolah dan guru, dengan memahami kebutuhan dan tantangan mereka dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang manajemen kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK. Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini atau mengeksplorasi aspek lain dari topik ini yang lebih sempurna.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rasionalisasi di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan serta dijawab setelah melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?
2. Bagaimana Pengorganisasian kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?
3. Bagaimana Pelaksanaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?
4. Bagaimana Pengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?
5. Bagaimana kendala kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?
6. Bagaimana Solusi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi evaluasi layanan dasar guru BK di SMPN 182 Dan SMP Islam Terpadu Arrahman Jakarta Selatan?